

STRENGTHENING BLUE ECONOMY THROUGH SUSTAINABLE AQUACULTURE BASED ON ISLAMIC ECONOMICS AND LOCAL WISDOM

Nur Hidayatul Istiqomah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

hidayatulnur98@gmail.com

Abstract: *This study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach to examine the integration of Blue Economy, local wisdom, and Islamic economics as the foundation for sustainable marine development in Indonesia. The SLR method is conducted through a structured process of identifying, screening, and synthesizing relevant peer-reviewed journal articles, policy documents, and empirical studies from reputable academic databases such as Scopus, ScienceDirect, Web of Science, and Google Scholar using predefined keywords and inclusion criteria. The selected literature is analyzed using thematic synthesis to identify conceptual linkages between ecological sustainability, socio-cultural resilience, and Islamic ethical principles. This method enables the study to generate a comprehensive conceptual framework demonstrating that local wisdom serves as an adaptive ecological governance system, while Islamic values such as khalifah, 'adl, maṣlahah, and mīzān provide a normative foundation for justice and environmental stewardship. Furthermore, the review highlights the strategic role of Islamic financial instruments such as Blue Sukuk and productive waqf in funding sustainable marine projects, indicating that the synergy between Blue Economy, local wisdom, and Islamic economics can support a contextual and inclusive maritime development model for Indonesia.*

Keywords: *Blue Economy, local wisdom, Islamic economics, Blue Sukuk, sustainable development, coastal communities.*

PENDAHULUAN

Sektor perikanan dan akuakultur memiliki peranan penting dalam ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekonomi nasional, terutama untuk negara kepulauan seperti Indonesia, sehingga pembahasan tentang penggunaan laut yang berkelanjutan (*Blue economy*) telah menarik perhatian besar dari para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi. Konsep Blue economy menyoroti pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Kajian terbaru menggarisbawahi bahwa konsep ini bersifat multidimensional (termasuk perikanan, akuakultur, ekowisata, energi terbarukan laut, bioteknologi kelautan, dll.) dan memerlukan inovasi serta pengelolaan yang adil untuk mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Pertumbuhan akuakultur secara global dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi faktor utama dalam produksi perikanan dunia dan memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan protein dari laut. Akan tetapi, pengembangan dan peningkatan akuakultur juga menimbulkan berbagai tantangan sosial dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, seperti risiko pencemaran (*eutrofikasi*), serangan penyakit, menurunnya akses masyarakat lokal terhadap laut, serta ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Ekonomi Biru yang hanya fokus pada peningkatan produksi tidak serta merta menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama jika aspek pengelolaan dan dukungan terhadap komunitas lokal diabaikan.

Dalam praktiknya, keberhasilan pembangunan pesisir dan kelautan sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan penerimaan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih berorientasi pada komunitas (dari Blue Economy menuju Blue Communities), yaitu dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat, partisipasi lokal, dan pembagian manfaat yang adil sebagai prasyarat utama legitimasi dan keberlanjutan program kelautan. Pendekatan ini menekankan bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan keterlibatan sosial dan lokal agar transformasi ekonomi benar-benar berkelanjutan sekaligus inklusif¹.

Kearifan lokal di Indonesia terbukti menjadi aset sosial-ekologis yang krusial dalam pengelolaan sumber daya laut. Beragam tradisi lokal, seperti larangan menangkap ikan di waktu tertentu, ketentuan mengenai area tangkap, upacara dan norma masyarakat, serta sistem kerja sama, berperan sebagai sarana pengelolaan penggunaan sumber daya sekaligus upaya pelestarian yang nyata. Pengintegrasian kearifan lokal ke dalam rancangan kebijakan seringkali memperkuat kepatuhan masyarakat, keefektifan konservasi, dan ketahanan sosial-ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, kearifan lokal seharusnya dianggap sebagai sumber praktik pengelolaan yang secara ekologis relevan dan diterima secara budaya, bukan hanya sebagai objek penelitian etnografis².

Selain aspek budaya dan sosial, dimensi normatif dan etis juga berkontribusi dalam pemahaman mengenai keberlanjutan. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam seperti konsep khalifah (amanah/penjagaan ciptaan), masalah (kemaslahatan umum), adl (keadilan), serta larangan eksploitasi berlebihan menawarkan kerangka nilai yang dapat memperkuat legitimasi moral pengelolaan sumber daya alam. Etika Islam menekankan bahwa sumber ajaran Islam menyediakan dasar normatif untuk tanggung jawab ekologis dan distribusi manfaat yang adil, serta mendukung instrumen-instrumen keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan³.

Di sektor keuangan dan kebijakan, ide-ide syariah seperti wakaf produktif, sukuk biru, dan pembiayaan Islam mulai diterapkan sebagai metode untuk memobilisasi modal bagi proyek kelautan yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta pelestarian. Di

¹ Jennifer Elston, Hugo Pinto, and Carla Nogueira, “Tides of Change for a Sustainable Blue Economy: A Systematic Literature Review of Innovation in Maritime Activities,” *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 24 (2024): 1–27, <https://doi.org/10.3390/su162411141>.

² Natelda R Timisela, Hellen Nanlohy, and Ignatia Dyahapsari, “Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Di Kawasan Konservasi Pulau Kei Kabupaten Maluku Tenggara,” *Model Sebaran Larva Karang Di Kawasan Konservasi ... 1 Diterima*, no. 2 (2017): 113–26, <http://coj.pksplpb.or.id/>;

³ Riham R. Rizk, “Islamic Environmental Ethics,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 5, no. 2 (September 2, 2014): 194–204, <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2012-0060>.



Indonesia, inisiatif-inisiatif awal seperti wakaf produktif di sektor perikanan dan usulan Cash Waqf Linked Blue Sukuk menunjukkan daya tarik instrumen ini dalam mengatasi kendala akses modal, mendukung proyek yang berbasis komunitas, serta menyinkronkan tujuan ekonomi dan ekologi sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, banyak penelitian masih bersifat teoretis atau berupa studi kasus awal, sehingga diperlukan analisis yang lebih terstruktur untuk mengevaluasi efektivitas dan potensi penerapannya secara luas⁴.

Meskipun penelitian mengenai Blue Economy, kearifan lokal, dan ekonomi Islam telah berkembang, masih ada kekurangan dalam studi yang secara terstruktur menggabungkan ketiga dimensi tersebut, yakni paradigma pembangunan Blue Economy yang fokus pada inovasi dan keberlanjutan, nilai-nilai etika serta instrumen keuangan dari Ekonomi Islam, dan praktik kearifan lokal yang berfungsi sebagai modal sosial untuk pengelolaan pesisir. Kesenjangan ini menghalangi kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang ekologis, etis, dan sesuai dengan konteks budaya. Tinjauan literatur sistematis terbaru merekomendasikan model terpadu yang menggabungkan elemen nilai dan pengelolaan lokal sebagai bagian penting dari strategi Blue Economy⁵.

Penelitian ini bertujuan untuk menyatukan bukti empiris dan konseptual dari beragam penelitian yang relevan, termasuk praktik kearifan lokal, etika, dan instrumen Ekonomi Islam (seperti wakaf dan sukuk berkelanjutan), serta literatur mengenai Blue Economy dan akuakultur. Studi ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan dan model pembiayaan syariah yang lebih relevan untuk mendukung pembangunan pesisir yang adil dan berkelanjutan⁶.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji dan mensintesis literatur secara sistematis terkait Blue Economy, kearifan lokal, dan Ekonomi Islam. Data diperoleh dari basis data ilmiah seperti Scopus, ScienceDirect, Web of Science, dan Google Scholar menggunakan kata kunci yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi berupa artikel terbit tahun 2014–2024, terindeks, akses penuh, dan membahas integrasi nilai ekonomi, sosial, budaya, dan Islam dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Artikel yang tidak relevan atau tidak melalui proses ilmiah disingkirkan. Tahap seleksi dilakukan melalui penyaringan judul, abstrak, dan isi untuk memastikan kelayakan. Literatur yang lolos dianalisis menggunakan metode thematic synthesis untuk mengidentifikasi tema utama serta memetakan hubungan antar konsep. Analisis ini menghasilkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip Blue Economy, nilai kearifan lokal, dan etika Ekonomi Islam dapat saling melengkapi dalam mendorong pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

⁴ Putri Rizka Citaningati and Kamaluddin Kamaluddin, "Sustainable Development Goals through Productive Fisheries Waqf," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 36, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v7i1.3952>.

⁵ Elston, Pinto, and Nogueira, "Tides of Change for a Sustainable Blue Economy: A Systematic Literature Review of Innovation in Maritime Activities," 2024.

⁶ Jennifer Elston, Hugo Pinto, and Carla Nogueira, "Tides of Change for a Sustainable Blue Economy: A Systematic Literature Review of Innovation in Maritime Activities," *Sustainability (Switzerland)* (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), December 1, 2024), <https://doi.org/10.3390/su162411141>.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Kearifan Lokal sebagai Fondasi Blue Economy yang Kontekstual

Konsep *Blue Economy* berkembang sebagai paradigma baru pembangunan ekonomi laut yang menekankan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan sosial. Namun, penerapannya sering kali bersifat top-down dan teknokratis, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-ekologis masyarakat pesisir di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, kearifan lokal (*Local Ecological Knowledge/LEK*) perlu diposisikan sebagai fondasi utama, bukan sekadar pelengkap, untuk memastikan bahwa Blue Economy tidak kehilangan dimensi sosial dan ekologisnya. Penggabungan pengetahuan lokal dengan sains modern menciptakan tata kelola kelautan yang lebih adaptif dan kontekstual karena pengetahuan lokal membawa pemahaman mendalam tentang dinamika lingkungan dan praktik berkelanjutan yang telah teruji waktu⁷.

Kearifan lokal bukan hanya kumpulan tradisi, tetapi sistem pengetahuan yang membentuk hubungan etis antara manusia dan laut. Dalam masyarakat pesisir Indonesia, misalnya, praktik seperti *sasi* di Maluku atau *panglima laot* di Aceh menjadi mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Komunitas pembudidaya ikan bandeng di Gresik mempraktikkan aturan adat tertentu yang mengatur siklus budidaya dan penggunaan input secara kolektif, yang ternyata berkontribusi terhadap stabilitas ekosistem tambak dan ketahanan ekonomi lokal⁸. Temuan tersebut menegaskan bahwa integrasi kearifan lokal tidak hanya memperkaya data ekologis, tetapi juga meningkatkan legitimasi kebijakan Blue Economy karena masyarakat merasa memiliki dan berpartisipasi dalam pengelolaannya.

Namun, integrasi tersebut membutuhkan desain kelembagaan yang mendukung. Struktur tata kelola akuakultur di Indonesia masih didominasi oleh kebijakan pusat yang tidak sepenuhnya mengenali variasi sosial-ekologis antar-komunitas⁹. Pendekatan yang bersifat seragam seringkali mengabaikan keberagaman pengetahuan lokal, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik lapangan. Karena itu, penerapan Blue Economy yang kontekstual memerlukan mekanisme *co-management* yaitu pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat lokal. Dengan cara ini, kearifan lokal dapat diintegrasikan secara ilmiah melalui dialog pengetahuan (*knowledge dialogue*), bukan subordinasi.

Selain memperkuat keberlanjutan, kearifan lokal juga memiliki nilai strategis dalam menghadapi perubahan iklim. Praktik masyarakat pesisir di Bali dan Lombok dalam memantau cuaca, pola angin, dan pasang surut telah lama berfungsi sebagai sistem

⁷ Margherita Paola Poto et al., "Knowledge Integration and Good Marine Governance: A Multidisciplinary Analysis and Critical Synopsis," *Human Ecology* 50, no. 1 (2022): 125–39, <https://doi.org/10.1007/s10745-021-00289-y>.

⁸ Citra Fitrie Riany, Stefan Partelow, and Ben Nagel, "Governance Challenges for Indonesian Pond Aquaculture: A Case Study of Milkfish Production in Gresik," *Frontiers in Aquaculture* 2, no. September (2023): 1–16, <https://doi.org/10.3389/faquc.2023.1254593>.

⁹ Riany, Partelow, and Nagel.



peringatan dini berbasis pengalaman empiris¹⁰. Ketika dikombinasikan dengan data ilmiah modern, informasi tersebut meningkatkan kapasitas adaptif komunitas dalam menjaga produktivitas perikanan dan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan temuan Nagel (2024) bahwa *archetypes* komunitas perikanan tradisional di Indonesia memiliki struktur sosial-ekologis yang dapat menjadi model *resilience building* dalam sistem Blue Economy¹¹.

Tantangan Ekologis dan Sosial dalam Pengembangan Akuakultur

Pengembangan akuakultur yang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadirkan dua sisi yang kontras: potensi besar dalam penyediaan pangan dan lapangan kerja, namun juga tantangan ekologis dan sosial yang kompleks. Secara ekologis, intensifikasi akuakultur sering kali menimbulkan beban nutrisi tinggi akibat pakan yang tidak termakan dan limbah organik, sehingga memicu eutrofikasi, menurunkan kadar oksigen terlarut, dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Eutrofikasi merupakan tantangan lingkungan paling serius dalam sistem budidaya modern karena menyebabkan ledakan alga dan kematian massal ikan¹². Tantangan lain muncul dari konversi habitat alami, terutama mangrove dan padang lamun, menjadi lahan tambak yang mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis pesisir. Penelitian di pesisir Indramayu menunjukkan bahwa ekspansi tambak ke wilayah mangrove meningkatkan kerentanan komunitas terhadap banjir rob dan memperparah degradasi ekosistem pesisir¹³.

Selain itu, intensifikasi akuakultur memperbesar risiko munculnya penyakit dan bio-risiko yang dapat menyebar ke populasi ikan liar. Penggunaan antibiotik tanpa pengawasan juga menimbulkan ancaman resistensi antimikroba yang berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Lemahnya regulasi lingkungan menyebabkan peningkatan kasus pencemaran air dan penyebaran penyakit lintas spesies dalam industri akuakultur¹⁴. Tantangan ekologis lainnya adalah dampak perubahan iklim yang mengubah suhu air, salinitas, dan pola cuaca ekstrem, sehingga mempengaruhi produktivitas budidaya. Kajian lain menekankan bahwa perubahan iklim telah mempercepat penurunan kualitas lingkungan perairan dan mengancam ketahanan akuakultur global¹⁵. Meskipun pendekatan seperti *Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA)* telah banyak direkomendasikan, implementasinya di Indonesia masih terbatas. Studi oleh Suryaningsih dan Rahman (2024)

¹⁰ Rizky Muliani Dwi Ujianti, Aan Burhanuddin, and Mega Novita, "Blue Economic Analysis in Coastal Areas of the Indonesian Java Sea Based on Fisheries," *Advances in Agriculture* 2024, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1155/2024/5550622>.

¹¹ Riany, Partelow, and Nagel, "Governance Challenges for Indonesian Pond Aquaculture: A Case Study of Milkfish Production in Gresik."

¹² Maria Lourdes San Diego-McGlone et al., "Fish Kills Related to Harmful Algal Bloom Events in Southeast Asia," *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 23 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.3390/su162310521>.

¹³ Sepanie Putiamini et al., "Social Vulnerability of Coastal Fish Farming Community to Tidal (Rob) Flooding: A Case Study from Indramayu, Indonesia," *Journal of Coastal Conservation* 26, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.1007/s11852-022-00854-7>.

¹⁴ Paul Bergot, "Environmental and Social Considerations in Textiles," *International Dyer* 191, no. 1 (2006): 26, <https://doi.org/10.35248/2155-9546.25.16.990>.

¹⁵ Xuelian Jiang and Wenfang Wang, "Climate Change and Aquatic Ecosystem Health: Impacts, Adaptation Strategies, and Future Challenges," *International Journal of Aquaculture* 14, no. 4 (2024): 221–31, <https://doi.org/10.5376/ija.2024.14.0022>.



pada budidaya nila di Klaten menemukan bahwa pelaksanaan EAA masih berada pada kategori “cukup” dan membutuhkan penguatan institusional serta monitoring yang berkelanjutan¹⁶.

Dari sisi sosial, tantangan utama terletak pada ketimpangan akses dan distribusi manfaat. Banyak pembudidaya skala kecil kesulitan memperoleh modal, teknologi, dan pasar, sementara keuntungan besar sering terkonsentrasi pada pelaku industri besar. Lima hambatan sosial dalam tata kelola akuakultur di Gresik, yaitu keterbatasan modal, lemahnya institusi pengelola, kegagalan program pemerintah, kurangnya kepemimpinan komunitas, dan rendahnya insentif aksi kolektif¹⁷. Ketidaksetaraan ini diperparah oleh kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil budidaya. Pembudidaya di daerah rawan rob mengalami penurunan pendapatan dan tingkat ketahanan pangan akibat degradasi lingkungan dan fluktuasi produksi¹⁸.

Tantangan sosial juga terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap proyek akuakultur yang tidak melibatkan partisipasi publik. Rendahnya penerimaan sosial menjadi faktor penghambat utama ekspansi akuakultur di banyak negara karena kebijakan sering diambil tanpa dialog dengan komunitas lokal¹⁹. Di Indonesia, ditemukan bahwa perbedaan persepsi antara pemerintah, petani, dan peneliti menyebabkan fragmentasi kebijakan dan rendahnya efektivitas tata kelola budidaya²⁰. Sementara itu, keberhasilan sistem budidaya komunitas sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan lokal dan kolaborasi antar-anggota.

Etika dan Prinsip Ekonomi Islam sebagai Pilar Normatif Pembangunan Laut

Pembangunan laut yang berkelanjutan membutuhkan fondasi nilai yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, etika dan prinsip ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang komprehensif karena menempatkan manusia sebagai *khalifah* (pemimpin dan penjaga bumi) yang memiliki amanah untuk mengelola alam secara adil dan bertanggung jawab. Prinsip ini berangkat dari pandangan tauhid yang menghubungkan seluruh aspek kehidupan dengan Allah SWT, sehingga pemanfaatan sumber daya laut tidak semata-mata untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan Tuhan. Konsep *khalifah* dan *mīzān* (keseimbangan)

¹⁶ Adi Nugroho, Susilo Budi Priyono, and Suadi Suadi, “Implementation of Ecosystem Approach to Aquaculture on Tilapia Commodities in Klaten District,” *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.22146/jfs.97839>.

¹⁷ Riany, Partelow, and Nagel, “Governance Challenges for Indonesian Pond Aquaculture: A Case Study of Milkfish Production in Gresik.”

¹⁸ Putiamini et al., “Social Vulnerability of Coastal Fish Farming Community to Tidal (Rob) Flooding: A Case Study from Indramayu, Indonesia.”

¹⁹ José Antonio Pérez Agúndez et al., “Strengthening Policy Action to Tackle Social Acceptability Issues in European Aquaculture,” *ICES Journal of Marine Science* 82, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaf100>.

²⁰ Riany, Partelow, and Nagel, “Governance Challenges for Indonesian Pond Aquaculture: A Case Study of Milkfish Production in Gresik.”



merupakan fondasi etis untuk mewujudkan ekonomi yang ekologis dan berkeadilan dalam konteks pembangunan maritim²¹.

Prinsip utama dalam ekonomi Islam seperti *'adl* (keadilan), *maṣlahah* (kemaslahatan umum), *wasāṭiyyah* (moderasi), dan *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) menjadi pedoman moral dalam tata kelola laut. Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam. Hal ini relevan dalam konteks pesisir, di mana masyarakat kecil seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh eksploitasi berlebihan dan ketimpangan akses terhadap sumber daya laut. Prinsip keadilan ekonomi Islam mampu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sistem distribusi manfaat yang lebih merata serta penguatan kelembagaan lokal yang inklusif²². Dengan demikian, pembangunan laut dalam perspektif Islam tidak boleh hanya menitikberatkan pada produktivitas dan keuntungan, melainkan juga harus memastikan keadilan antargenerasi serta keberlanjutan ekologis.

Selain itu, prinsip *mīzān* (keseimbangan) dan larangan *isrāf* (pemborosan) sangat relevan dalam menghadapi tantangan degradasi lingkungan laut. Keseimbangan ekosistem laut harus dijaga melalui praktik budidaya, penangkapan ikan, dan eksplorasi sumber daya yang tidak melebihi daya dukung alam. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan konsep *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* modern, di mana pelestarian lingkungan termasuk dalam tujuan syariah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Integrasi nilai *mīzān* dan *ḥifẓ al-bi'ah* dalam pembangunan laut sejalan dengan paradigma *Blue-Green Economy* yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan ekosistem²³.

Etika Islam juga menuntut moderasi (*wasāṭiyyah*) dalam setiap bentuk eksploitasi laut. Moderasi dalam konteks ini bukan berarti pembatasan mutlak, tetapi mengedepankan pemanfaatan proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan regenerasi alam. Prinsip ini penting dalam mencegah praktik *overfishing*, pencemaran laut, dan konversi ekosistem pesisir seperti mangrove menjadi kawasan industri atau tambak intensif. Dengan mempraktikkan nilai moderasi, pembangunan laut dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis.

Inovasi Pembiayaan Syariah untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan

Inovasi pembiayaan syariah muncul sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan, di mana instrumen-keuangan syariah seperti sukuk biru (Blue Sukuk) dan instrumen pembiayaan hijau syariah lainnya menjadi mekanisme strategis untuk mendanai proyek-kelautan yang ramah lingkungan dan inklusif. Di Indonesia, Blue Sukuk dirancang untuk mendukung pemulihan ekosistem laut serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, namun implementasinya masih

²¹ Erin Gayatri, "Bridging Ecology and Economy Through Islamic Ethics of Stewardship," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 18, no. 2 (2017): 103–10, <https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4020>.

²² Ainol Yaqin et al., "Peran Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir," *Jurnal Economina* 2, no. 12 (2023): 3584–92, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1039>.

²³ Muniri and Nur Azis, "Blue Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan," *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 2 (2021): 1–20.



terkendala aspek regulasi dan pasar²⁴. Studi lain menambahkan bahwa Blue Sukuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan memfasilitasi pembiayaan proyek berbasis ekonomi biru dan syariah misalnya konservasi terumbu karang, budidaya perikanan berkelanjutan, dan inklusi keuangan bagi nelayan/tradisional²⁵.

Lebih luas, konsep “Blue Finance” yaitu skema pembiayaan yang secara spesifik diarahkan kepada proyek-kelautan dan pesisir yang memiliki dampak lingkungan dan sosial positif memberikan ruang bagi keuangan syariah untuk berkontribusi dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sebuah laporan oleh United Nations Development Programme (UNDP) memproyeksikan bahwa pendanaan berbasis syariah seperti sukuk hijau bisa mencapai US\$ 30-50 miliar untuk tujuan iklim dan SDGs, yang membuka peluang besar bagi sektor kelautan²⁶.

Meski demikian, sejumlah tantangan signifikan masih harus diatasi agar inovasi pembiayaan syariah benar-benar efektif dalam ekonomi laut. Dari perspektif regulasi dan pasar, penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara regulasi syariah nasional, standar internasional (seperti ICMA Green/Blue Bond Principles), dan transparansi pelaporan untuk investor masih lemah²⁷. Dari sisi teknis, pengidentifikasian proyek yang eligible untuk Blue Sukuk misalnya proyek budidaya ramah lingkungan, restorasi mangrove atau terumbu karang, pengelolaan sampah laut masih memerlukan kerangka yang jelas, termasuk penilaian sosial-ekologis, monitoring dan pelaporan yang andal.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, suatu kerangka yang menyatukan aspek keuangan syariah, nilai etis (khalifah, mizān, ‘adl), dan praktik kelautan berkelanjutan menjadi sangat penting. Praktik inovasi seperti penerbitan Blue Sukuk yang digunakan khusus untuk pembiayaan budidaya berkelanjutan, restokasi ekologis pesisir, atau penguatan komunitas nelayan menjadi contoh konkret. Kebijakan pendukung seperti instrumen insentif pajak, jaminan risiko, pelaporan ESG-syariah, dan digitalisasi investasi syariah juga dapat mempercepat adopsinya sebagaimana disebutkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam lima strategi majukan sukuk hijau dan digitalisasi ekonomi syariah²⁸.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi laut yang berkelanjutan tidak dapat hanya dilihat sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya maritim, tetapi harus

²⁴ Muhammad Hendri Yanova and Parman Komarudin, “Penggunaan Blue Sukuk Sebagai Instrumen Pendanaan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Perspektif Regulasi,” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 16–23, <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7323>.

²⁵ Imroatus Sholiha, Mifatahul Hasanah, and Lusi Oktaviani, “Blue Sukuk Dan Kontribusinya Terhadap Keberlangsungan Ekosistem Laut Di Indonesia,” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah”* 5, no. 1 (2023): 27–37, <https://doi.org/10.32528/at.v5i1.833>.

²⁶ Muhmmad Hardiana, “Laporan Baru UNDP: Potensi 50 Miliar Dolar Pendanaan Syariah Untuk Perubahan Iklim & SDGs,” *Laporan Baru UNDP*, 2021.

²⁷ Yanova and Komarudin, “Penggunaan Blue Sukuk Sebagai Instrumen Pendanaan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Perspektif Regulasi.”

²⁸ Erwin Haryono, “Lima Strategi Majukan Sukuk Hijau Dan Digitalisasi Ekonomi Syariah,” *Berita Terkini BI*, 2022.



dipahami sebagai transformasi sistemik yang mengintegrasikan dimensi ekologi, sosial, budaya, dan etika. Paradigma *Blue Economy* dalam konteks Indonesia menuntut pendekatan yang kontekstual, yaitu dengan menyesuaikan strategi kebijakan terhadap karakter sosial-ekologis masyarakat pesisir dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan sumber daya laut. Kearifan lokal seperti sasi di Maluku, panglima laot di Aceh, dan sistem budidaya kolektif di Jawa terbukti tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai instrumen ekologis yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi. Oleh karena itu, integrasi pengetahuan tradisional dengan sains modern menjadi dasar penting dalam membangun Blue Economy yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Nilai dan instrumen Ekonomi Islam memberikan fondasi normatif serta solusi praktis untuk memperkuat implementasi *Blue Economy*. Prinsip khalifah (tanggung jawab manusia sebagai penjaga alam), *mīzān* (keseimbangan), dan *‘adl* (keadilan) menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi pembiayaan syariah seperti Blue Sukuk dan wakaf produktif menyediakan mekanisme pendanaan etis untuk mendukung proyek konservasi, budidaya berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Sinergi antara Blue Economy, kearifan lokal, dan prinsip Ekonomi Islam membentuk kerangka konseptual yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan maritim yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agüero, José Antonio Pérez, Ramón Filgueira, Nesar Ahmed, Furqan Asif, Suzannah Lynn Billing, Lucia Fanning, Amber Himes-Cornell, et al. "Strengthening Policy Action to Tackle Social Acceptability Issues in European Aquaculture." *ICES Journal of Marine Science* 82, no. 7 (2025). <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaf100>.
- Bergot, Paul. "Environmental and Social Considerations in Textiles." *International Dyer* 191, no. 1 (2006): 26. <https://doi.org/10.35248/2155-9546.25.16.990>.
- Citaningati, Putri Rizka, and Kamaluddin Kamaluddin. "Sustainable Development Goals through Productive Fisheries Waqf." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 36. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v7i1.3952>.
- Elston, Jennifer, Hugo Pinto, and Carla Nogueira. "Tides of Change for a Sustainable Blue Economy: A Systematic Literature Review of Innovation in Maritime Activities." *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 24 (2024): 1–27. <https://doi.org/10.3390/su162411141>.
- . "Tides of Change for a Sustainable Blue Economy: A Systematic Literature Review of Innovation in Maritime Activities." *Sustainability (Switzerland)*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), December 1, 2024. <https://doi.org/10.3390/su162411141>.
- Gayatri, Erin. "Bridging Ecology and Economy Through Islamic Ethics of Stewardship." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 18, no. 2 (2017): 103–10. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4020>.
- Hardiana, Muhammad. "Laporan Baru UNDP: Potensi 50 Miliar Dolar Pendanaan Syariah



- Untuk Perubahan Iklim & SDGs.” *Laporan Baru UNDP*, 2021.
- Haryono, Erwin. “Lima Strategi Majukan Sukuk Hijau Dan Digitalisasi Ekonomi Syariah.” *Berita Terkini BI*, 2022.
- Imroatus Sholiha, Mifatahul Hasanah, and Lusi Oktaviani. “Blue Sukuk Dan Kontribusinya Terhadap Keberlangsungan Ekosistem Laut Di Indonesia.” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah”* 5, no. 1 (2023): 27–37. <https://doi.org/10.32528/at.v5i1.833>.
- Jiang, Xuelian, and Wenfang Wang. “Climate Change and Aquatic Ecosystem Health: Impacts, Adaptation Strategies, and Future Challenges.” *International Journal of Aquaculture* 14, no. 4 (2024): 221–31. <https://doi.org/10.5376/ija.2024.14.0022>.
- Muniri, and Nur Azis. “Blue Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan.” *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 7, no. 2 (2021): 1–20.
- Nugroho, Adi, Susilo Budi Priyono, and Suadi Suadi. “Implementation of Ecosystem Approach to Aquaculture on Tilapia Commodities in Klaten District.” *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.22146/jfs.97839>.
- Poto, Margherita Paola, Annegret Kuhn, Apostolos Tsiouvalas, Kara K. Hodgson, Montoya Valentina Treffenfeldt, and Christine M.Beitl. “Knowledge Integration and Good Marine Governance: A Multidisciplinary Analysis and Critical Synopsis.” *Human Ecology* 50, no. 1 (2022): 125–39. <https://doi.org/10.1007/s10745-021-00289-y>.
- Putiamini, Sepanie, Mari Mulyani, Mufti Patria Petala, Tri Edhi Boedi Soesilo, and Asep Karsidia. “Social Vulnerability of Coastal Fish Farming Community to Tidal (Rob) Flooding: A Case Study from Indramayu, Indonesia.” *Journal of Coastal Conservation* 26, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11852-022-00854-7>.
- R. Rizk, Riham. “Islamic Environmental Ethics.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 5, no. 2 (September 2, 2014): 194–204. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2012-0060>.
- Riany, Citra Fitrie, Stefan Partelow, and Ben Nagel. “Governance Challenges for Indonesian Pond Aquaculture: A Case Study of Milkfish Production in Gresik.” *Frontiers in Aquaculture* 2, no. September (2023): 1–16. <https://doi.org/10.3389/faq.2023.1254593>.
- San Diego-McGlone, Maria Lourdes, Aletta T. Y-iguez, Garry Benico, Wai Mun Lum, Kieng Soon Hii, Sandric Chee Yew Leong, Chui Pin Leaw, Mitsunori Iwataki, and Po Teen Lim. “Fish Kills Related to Harmful Algal Bloom Events in Southeast Asia.” *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 23 (2024): 1–25. <https://doi.org/10.3390/su162310521>.
- Timisela, Natelda R, Hellen Nanlohy, and Ignatia Dyahapsari. “Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Di Kawasan Konservasi Pulau Kei Kabupaten Maluku Tenggara.” *Model Sebaran Larva Karang Di Kawasan Konservasi ... I Diterima*, no. 2 (2017): 113–26. <http://coj.pksplipb.or.id/>;
- Ujjanti, Rizky Muliani Dwi, Aan Burhanuddin, and Mega Novita. “Blue Economic Analysis in Coastal Areas of the Indonesian Java Sea Based on Fisheries.” *Advances in*



Agriculture 2024, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1155/2024/5550622>.

- Yanova, Muhammad Hendri, and Parman Komarudin. "Penggunaan Blue Sukuk Sebagai Instrumen Pendanaan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Perspektif Regulasi." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 16–23. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7323>.
- Yaqin, Ainol, Ahmad Saidi, Ainun Fathor Rozy, Deni Arisandi, Fathul Munir, Feri Kurniawan, and Imam Khusairi. "Peran Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir." *Jurnal Economina* 2, no. 12 (2023): 3584–92. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1039>.

